

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI IMPOR MAINAN ANAK DARI CHINA (2015-2018)

Intan Septiani*, Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti.

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta. Jl. RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp/Fax. 7656971

Email: Intan.septiani2479@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia needs to conduct trade relations with various countries. The implementation of Indonesia's relations with other countries has been realized through the implementation of the Free Trade Agreement. One form of Free Trade Agreement which is run by Indonesia together with China is ACFTA. With the formation of ACFTA, the flow of trade between Indonesia and China has become increasingly free without any hindrance, this has led to the high import situation in Indonesia. One of them is the import of children's toy products which in recent years has become an issue that is very often discussed in the world economy. On the issue that occurred finally the Indonesian government together with related agencies made several Foreign Policies to reduce the rate of imports of children's toy products in Indonesia such as mandatory SNI regulations and also other standardization. The policy can be well received by Chinese importers, but not many of them violate it, so that the value of children's toys imports in Indonesia continues to increase. From this factor it can be said that the implementation of foreign policy for China has not been able to run well and has not been able to suppress the high value of imports of children's toys in Indonesia.

Keywords: ACFTA, Import of Children's Toys, Free Trade, Foreign Policy, SNI, Standardization, Policy Implementation.

ABSTRAK

Indonesia perlu melakukan hubungan perdagangan dengan berbagai Negara. Implementasi hubungan Indonesia dengan negara lain telah diwujudkan melalui penerapan *Free Trade Agreement*. Salah satu bentuk *Free Trade Agreement* yang dijalankan oleh Indonesia bersama dengan China yaitu ACFTA. Dengan terbentuknya ACFTA menyebabkan arus perdagangan Indonesia dengan China semakin bebas tanpa adanya hambatan apapun, hal tersebut menyebabkan keadaan impor di Indonesia menjadi tinggi. Salah satunya impor produk mainan anak yang beberapa tahun belakangan ini menjadi sebuah isu yang sangat sering dibahas dalam dunia perekonomian. Atas permasalahan yang terjadi akhirnya pemerintah Indonesia bersama instansi terkait membuat beberapa Kebijakan Luar Negeri untuk menekan laju impor produk mainan anak di Indonesia seperti regulasi SNI wajib dan juga standarisasi lainnya. Kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para importir China namun tidak banyak juga yang melanggarnya sehingga masih menyebabkan nilai impor mainan anak di Indonesia terus mengalami kenaikan. Dari faktor itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan luar negeri untuk China belum mampu berjalan dengan baik dan belum bisa untuk menekan tingginya nilai impor mainan anak di Indonesia.

Kata Kunci : ACFTA, Impor Mainan Anak, Perdagangan Bebas, Kebijakan Luar Negeri, SNI, Standarisasi, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Melihat kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, maka Indonesia perlu melakukan hubungan perdagangan dengan berbagai negara. Hal itu dilakukan agar Indonesia mendapatkan keuntungan dari negara lain dalam memenuhi kebutuhan negara nya. Minimnya factor produksi yang sangat terbatas menjadi alasan utama atas berlangsungnya hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain.

Implementasi hubungan Indonesia dengan negara lain telah diwujudkan melalui penerapan *Free Trade Agreement*. Dalam melakukan kegiatan perdagangan bebas akhirnya negara perlu membuat sebuah perjanjian baik itu perjanjian bilateral maupun multilateral. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dapat menjadi bukti terhadap keikutsertaan Indonesia dalam merealisasikan kepentingan Indonesia. Salah satu bentuk *Free Trade Agreement* yang dijalankan oleh Indonesia bersama dengan China yaitu ACFTA, sebuah perjanjian antara negara anggota ASEAN dengan China sebagai

aktor utama untuk mendukung perekonomian negara-negara anggota ASEAN.

Dalam pembentukannya tentunya ACFTA mempunyai tujuan bagi negara anggota ASEAN, yaitu supaya negara-negara yang tergabung di dalam perjanjian perdagangan tersebut dapat merasakan keuntungan seperti pengurangan dan bahkan tidak adanya tarif yang berlaku di dalam kegiatan pasar bebas. Sehingga proses kegiatan impor-ekspor barang, jasa, serta investasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kedua negara. Kalau dilihat dari data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa “Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai populasi penduduk terbesar dan juga pasar terbesar di Asia Tenggara memiliki hubungan yang sangat baik kepada China, sehingga setelah diberlakukannya perjanjian ACFTA hubungan China dengan Indonesia semakin erat karena kedua negara sama-sama saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di negaranya (Kemendag, 2010)

Penulis telah melihat isu yang mulai ramai diperbincangkan di

beberapa tahun belakang ini yaitu tentang banyaknya barang yang datang dari negara China dalam menguasai pasar bebas, salah satunya yaitu mainan anak dari China. Perlu kita ketahui mainan merupakan sebuah kebutuhan di dalam kehidupan anak. Mainan adalah sumber kesenangan untuk anak-anak, akan tetapi mainan juga tidak hanya sebagai sumber kesenangan semata melainkan ada sisi yang dapat di ambil dari mainan anak tersebut untuk belajar menggali kretivitas terpendam di diri anak tersebut.

Gambar. 1.1 Sepuluh Negara Asal Impor Mainan Anak, 2010-2014

Tabel 1. Sepuluh Negara Asal Impor Mainan Anak, 2010-2014

NEGARA	NILAI: USD					Total 2010-2013	Tren (%) 10-14
	2010	2011	2012	2013	2014		
TOTAL	77.189.378	102.679.033	112.166.333	114.518.536	65.865.340		
RRT	62.989.370	89.145.916	95.544.691	92.200.836	39.390.556	339.880.813	-8,65
MALAYSIA	2.087.043	3.094.873	5.260.373	4.535.394	7.995.929	14.977.483	35,92
DENMARK	807.589	1.006.204	2.182.054	2.405.045	4.385.643	6.400.892	49,84
HONG KONG	5.358.976	3.742.137	2.793.951	7.177.288	4.255.108	19.072.352	1,92
THAILAND	1.107.613	1.116.578	1.255.284	1.080.967	2.214.264	4.560.442	14,49
MEKSIKO	25.504	16.609	33.100	1.175.027	1.231.272	1.250.240	232,44
JEPANG	493.832	331.468	1.378.781	625.038	1.013.583	2.829.119	23,03
VIETNAM	145.080	300.947	230.362	763.751	770.664	1.440.140	53,28
SINGAPURA	1.727.835	1.372.339	1.044.779	2.008.796	674.981	6.153.749	-13,92
KOREA SELATAN	335.199	349.336	429.332	669.797	633.382	1.783.664	21,21
LAINNYA	2.111.337	2.202.826	2.013.626	1.876.597	3.299.958	8.204.386	7,60

Sumber: Puska Daglu Kementerian Perdagangan (2015), diolah

Sumber : Kementerian Perdagangan, (2015).

Dalam Tabel 1. bisa dilihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok ada negara terbesar pengimpor mainan anak untuk Indonesia dengan total impor mencapai USD 339 juta di tahun 2010-2013. Masyarakat di Indonesia sangat memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk mainan anak walaupun harga dari produk tersebut mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, artinya mainan anak memang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Sebelum memasuki pasar Indonesia, awalnya China telah mengirimkan produk mainan anak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Ketiga negara itu menjadi sasaran utama ekspor China yang termasuk didalamnya yaitu ekspor mainan anak. Respon mereka dalam menerima impor mainan anak dari China sangat baik seperti halnya China menaruh barang lainnya di negara mereka. Namun, karena adanya sebuah peraturan ketat yang diberlakukan oleh setiap negara akhirnya China mulai mencari negara lain untuk menyebarluaskan produknya tanpa adanya hambatan.

Berbicara mengenai tingginya nilai impor mainan anak di Indonesia tentu hal tersebut akan menimbulkan sebuah dampak bagi produk dalam negeri, dimana produk dalam negeri akan kalah saing dengan produk yang datang dari China. Hal tersebut jelas akan mematikan para pengrajin lokal dan mengakibatkan munculnya ladang pengangguran di Indonesia.

Dari dampak yang terjadi bagi Indonesia akhirnya pemerintah perlu melakukan sebuah upaya untuk melindungi produk dalam negeri agar tetap hidup. Lalu, di tahun 2013 muncul lah ide mengenai pemberlakuan standarisasi yang diberikan pemerintah untuk melindungi para anak – anak ketika ingin membeli produk mianan tersebut. Pemerintah menyebutkan bahwa para pelaku usaha dan juga distributor mainan anak wajib memberikan standarisasi terhadap produk yang ingin mereka pasarkan.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013/ yang merupakan perubahan dari

Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Menurut (BSN, 2018), selaku lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional, telah menetapkan lima SNI berkenaan dengan keamanan dan keselamatan mainan anak (BSN, 2018). Terdapat aturan SNI tersebut yaitu :

- 1). “SNI ISO 8124 - 1
- 2). SNI ISO 8124 - 2
- 3). SNI ISO 8124 - 3
- 4). SNI ISO 8124 - 4
- 5). SNI IEC 62115:2011
- 6). SNI 7617:2010
- 7). EN 71-5 C (BSN, 2018).

Setelah adanya peraturan tersebut diharapkan siapa saja yang ingin membeli mainan dari luar negeri, wajib mengurus izin SNI dari Kementerian Perindustrian dan apabila tidak ada izin SNI produk tersebut akan langsung dikembalikan di negara

asal. Alasan dibuatnya peraturan tersebut dikarenakan banyaknya pendistribusian mainan anak, khususnya impor mainan anak yang mengandung logam berat sehingga dapat membahayakan kesehatan anak.

Namun, pada kenyataannya setelah peraturan tersebut sudah dibuat masih banyak para importir dari China masih mengabaikan peraturan tersebut dan belum menerapkannya di dalam produk mainan mereka, sehingga hal tersebut akan berdampak kepada keamanan, keselamatan dan juga kesehatan pada anak. Alasan China masih saja mengabaikan peraturan tersebut karena adanya bentuk perjanjian kerjasama ACFTA. China menganggap ACFTA dapat memberi akses untuk terus menyebarluaskan produknya di Indonesia tanpa adanya sebuah regulasi yang dapat mempersulit proses impor tersebut. China berkeyakinan dalam perjanjian tersebut dijelaskan tidak adanya sebuah hambatan terhadap proses perdagangan bebas, sehingga dengan alasan tersebut China dapat mengirim produk mainan nya masuk ke Indonesia. Dengan

melihat kondisi mainan anak dari China yang masih banyak belum memiliki standarisasi, apabila hal ini terus didiamkan akan semakin menimbulkan suatu permasalahan baru di dalam proses kerjasama impor mainan anak antara China dengan Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai peraturan lain yang Indonesia buat dalam menghadapi impor mainan anak dari China.

KERANGKA TEORI

- Kebijakan Luar Negeri

Menurut Rosenau dalam (Dugis, 2007), “Kebijakan Luar Negeri dapat terbagi menjadi tiga konsep dasar integrasi dan saling berkaitan satu sama lain, pembuatan suatu kebijakan harus merujuk pada sebuah nilai, sikap, dan juga pandangan yang dianut oleh negara lain. Kedua, kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi dan komitmen yang mendasari aktivitas dari negara tersebut. Ketiga, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri negara harus membuat kebijakan tersebut sesuai dengan fenomena yang nyata dan pengalaman sebelumnya sehingga kebijakan tersebut tidak akan sia-

sia” (Dugis, 2007). Teori kebijakan luar negeri disini berkaitan dengan kebijakan luar negeri dari segi ekonomi dimana Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam rangka untung menyelamatkan sisi perekonomian dalam hal impor produk mainan anak.

Penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri dalam menganalisis serta menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi impor produk mainan anak dari China. Teori kebijakan luar negeri akan dijadikan acuan utama di penulis dalam membedah kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga berbicara mengenai cara ataupun strategi seperti apa dalam merumuskan kebijakan tersebut.

- Perdagangan Bebas

Menurut (Winarno, 2011) perdagangan bebas merujuk pada perdagangan yang tidak terhambat oleh berbagai pajak dan hambatan-hambatan lain seperti penerapan tarif dan kuota perdagangan.

Dari konsep ini, jelas menggambarkan proses hubungan yang terjadi antara Indonesia

dengan China dilakukan tanpa adanya sebuah hambatan apapun. Dalam hal ini khususnya China akan mendapatkan keuntungan besar dari kerjasama tersebut, China dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pasar utama untuk produk mainan anak dari China. Sedangkan untuk Indonesia sendiri perdagangan bebas ini akan menimbulkan sebuah dampak yang terjadi, jika dilihat dari sisi negatifnya perdagangan bebas ini justru akan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Namun, mau tidak mau Indonesia harus tetap terlibat dalam sebuah perdagangan bebas tersebut karena kita mengetahui bahwa Indonesia belum bisa mampu memproduksi mainan anak yang banyak dibutuhkan oleh para konsumen, itu sebabnya mengapa Indonesia harus tetap melakukan liberalisasi perdagangan dengan China untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri.

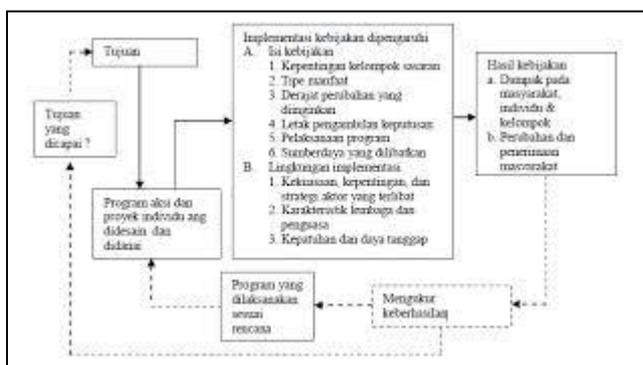
- Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan suatu kerangka aktivitas yang berasal dari sebuah kebijakan lalu digunakan sebagai upaya untuk

menghasilkan suatu output bagi masyarakat (Wibawa, 1994).

Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia apakah dapat berjalan dengan semestinya dan berhasil menekan nilai impor dari China atau bahkan sebaliknya tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam menganalisis penulis juga menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Gambar. 1.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut (Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11).



Sumber : Merilee S.

Grindle. 1980 : 11 (data diolah)

METODE RISET

Berbicara metode penelitian, penulis menggunakan metode analisa deskriptif analisis. Penelitian ini digunakan untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena dan juga masalah sosial yang sedang terjadi secara mendalam” (Bungin, 2012). Proses penelitian ini melibatkan wawancara dengan memunculkan sebuah pertanyaan dari topik yang telah penulis tentukan dalam penelitian ini. Setelah data diperoleh penulis dalam melakukan interpretasi dan mampu menganalisis masalah tersebut sehingga menghasilkan sebuah laporan penelitian.

Seperti halnya dalam penelitian penulis mengenai kebijakan Indonesia dalam menghadapi impor mainan anak dari China periode 2015-2018, berasal dari pemahaman penulis terhadap berbagai isu permasalahan sosial yang memang banyak di perbincangkan sampai ke kancah internasional. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Fokus didalam studi kasus ini berbicara mengenai

kasus dalam suatu permasalahan yang sedang terjadi di dalam dunia perdagangan internasional mengenai impor produk mainan dari China serta juga adanya fokus kesehatan untuk individu ataupun sekelompok orang yang juga menjadi isu dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hubungan Perdagangan Indonesia-China di dalam ACFTA.

Berbicara mengenai hubungan perdagangan antara China dengan Indonesia sebenarnya mereka sudah menjalin hubungan cukup lama namun hubungan tersebut diwarnai dengan sikap pro dan kontra antara China dengan Indonesia. Terdapat sebuah dinamika diantara hubungan kerjasama ekonomi di antara keduanya baik dalam bidang perdagangan maupun bidang investasi.

Setelah melewati keadaan yang cukup panjang akhirnya hubungan perdagangan keduanya mulai membaik ditahun 90-an dengan memperlihatkan sebuah hubungan diplomatik yang lebih erat dari sebelumnya. Ditambah

dengan dibentuknya ACFTA sebagai sebuah perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China dapat terus menggiring hubungan perdagangan antara Indonesia dan China terus berkembang dan dapat mengalami peningkatan yang cukup baik.

Perdagangan Indonesia dengan China mulai mengalami peningkatan di tahun 1965 dengan bersamaan dibentuknya poros Jakarta-Peking yang dapat menumbuhkan nilai sebesar 139 juta US\$ atau naik sekitar 15,5%. Hal tersebut dapat terjadi karena hubungan diplomatik yang terjadi antara keduanya berjalan dengan baik dan saling menguatkan satu sama lain. Sementara memasuki tahun 1999 nilai perdagangan antara China dan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu naik sekitar 33,1 % nilai tersebut jauh dibandingkan dengan tahun 1998. Lalu, sampai saat ini pun China masih menjadi negara pengimpor tertinggi bagi Indonesia dengan mengimpor barang seperti mesin AC, Elektronik, Alas kaki, ataupun mainan anak.

Pemberlakuan ACFTA memberi dampak terhadap ekspor

Indonesia yang di nilai tidak dapat meningkat dibandingkan dengan nilai impor yang semakin tinggi. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya sebuah liberalisasi perdagangan justru dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia.

Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dengan China melalui kerangka ACFTA berlangsung tanpa adanya sebuah hambatan dengan penjelasan bahwa baik China maupun Indonesia berhak meng ekspor ataupun meng impor suatu barang/jasa secara bebas sesuai dengan perjanjian yang tentunya telah disepakati antar kedua negara.

Dengan melakukan perdagangan bebas pun akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi kedua negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kegiatan liberalisasi perdagangan yang terjadi pasti akan menimbulkan sebuah persaingan antara Indonesia dan China, persaingan tersebut akan menimbulkan sebuah pemerataan sumber daya manusia baik sumber daya alam. Hal lain yang bisa diuntungkan dari proses liberalisasi

perdagangan yaitu untuk lebih meningkatkan kemampuan dari sumber daya itu sendiri dalam bentuk produk, teknologi, sehingga dapat membangkitkan produktivitas suatu negara.

Dinamika Impor Komoditas Mainan Anak dari China Periode.

Terdapat data mengenai impor mainan anak dari China yang berhasil penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait impor di Kementerian Perdagangan. Data dibawah menjelaskan mengenai nilai impor dari enam negara asal dari tahun 2015-2018 dengan jumlah tertinggi di dunia dengan China yang menduduki posisi pertama.

Gambar 1.3 Nilai Impor Produk Mainan dari Negara di Dunia.

No.	Negara Asal	Nilai (USD)			
		2015	2016	2017	2018
1.	China	53.604.667	73.081.596	110.711.582	183.689.667
2.	Denmark	14.784.283	11.391.234	7.776.262	2.463.649
3.	Malaysia	6.989.255	10.397.148	8.198.215	6.606.690
4.	Thailand	2.844.545	4.353.012	3.150.787	4.565.716
5.	Japan	1.951.769	1.677.640	1.316.908	3.370.376
6.	Vietnam	1.358.278	860.473	2.841.288	3.704.520
Total		81.532.797	101.761.102	133.995.043	204.400.618

Sumber :Direktorat Impor,
Kemendag (2018).

Data diatas memperlihatkan bahwa impor mainan anak dari China ke Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ditahun 2015 nilai impor mainan anak menyentuh angka **53.604.667 USD** dan selalu bertambah hingga menyentuh angka **183.689.667 USD** ditahun 2018. Hal tersebut terjadi karena pemberlakuan ACFTA yang memang sudah ada sejak tahun 2010, penggunaan prinsip yang diusung oleh ACFTA yaitu perdagangan bebas dengan alasan seperti itulah impor mainan anak dari China ke Indonesia bisa melambung dengan tinggi. ACFTA selalu mengusung konsep dimana dalam penjualan produk yang terjadi antar negara tidak melalui pajak ekspor maupun impor.

Dampak Tingginya Impor Mainan Anak untuk Indonesia

Impor mainan anak bagi Indonesia akan memberikan dampak terhadap bidang ekonomi yaitu terjadinya sebuah penurunan permintaan konsumen bagi produk dalam negeri. Hal itu dapat terjadi

karena para konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk mainan dari luar negeri salah satunya mainan dari China yang harganya jauh lebih murah dan dengan kualitas yang tahan lama dibandingkan dengan produk dalam negeri. Tak hanya itu, akibat dari penurunan permintaan konsumen terhadap barang dalam negeri mengakibatkan industri dalam negeri pun jadi mati karena sudah tidak ada barang yang mereka produksi (Dwinanda, 2017).

Kategori produk mainan anak yang harus di batasi impornya dari China seperti, *Baby Walker*, Sepeda roda tiga, Sekuter, *Stuffed toy*, *Puzze* dan mainan plastik sejenisnya (Kemendag, Peraturan Ketentuan Produk Impor Tertentu, 2015).

Kebijakan Indonesia dalam menghadapi Impor Mainan Anak dari China (2015-2018).

- **Penerapan Regulasi tentang Ketentuan Impor Produk Mainan Anak dari China**

Sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi serta membatasi lonjakan impor mainan yang cukup tinggi di Indonesia, maka dibuatlah sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia. Regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2015 ini, dimana terdapat nya adanya sebuah pengelompokan jalur dalam mendistribusikan produk dari negara importir.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan ibu Ani Mulyati, informant dari Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Desember 2019, dijelaskan bahwa Respon dari China sendiri sebagai negara pengimpor memang tidak terlalu merasa kesulitan, China selalu menganggap bahwa semua peraturan yang diberikan oleh negara Indonesia memang selalu berlaku tidak tegas atau dengan kata lain hanya untuk menggretak pihak importir untuk tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan impor mainan anak ke Indonesia.

Terlebih lagi belum ada pengelompokan secara jelas mengenai aturan impor produk mainan anak dari China, dengan

adanya peraturan tersebut China masih terus berupaya untuk mengimpor mainan anak yang ia produksi untuk dipasarkan di Indonesia, namun harus tetap melalui aturan dan prosedur sesuai dengan peraturan tersebut. China akan terus memanfaatkan pasar Indonesia sebagai alat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di negaranya.

Namun, dalam penerapannya untuk China menurut Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan masih terdapat nya mainan yang di jumpai di pasar Indonesia yang belum ber label SNI dikarenakan para importir China yang masih susah untuk mengikuti regulasi yang diberikan oleh Indonesia. Jadi, bisa dikatakan bahwa proses masuk produk mereka tidak sesuai dengan aturan yang telah di tentukan.

Hal lainnya yang perlu diketahui bahwa adanya sebuah modus baru yang dilakukan oleh importir China dalam melakukan pengiriman produk mainan yang tidak sesuai dengan aturan. Modus itu ialah berkaitan mengenai pemberian *Code HS* terhadap

produk mainan anak tersebut yang artinya bahwa para importir China telah memalsukan kode tersebut dengan tidak semestinya. Sehingga jika para importir telah memalsukan *Code HS*, mereka dapat memasukan produk mainan anak tanpa adanya pemeriksaan yang sesuai berkaitan dengan produk mainan anak (Sadewo, 2015)

- **Penerapan SNI Terhadap Komoditas Mainan Anak dari China**

Penerapan SNI wajib untuk mainan ini sebenarnya sudah dibuat dari tahun 2013 namun dalam penerapannya regulasi tersebut kurang dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan kondisi impor mainan anak terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Akhirnya pada tahun 2018 dilakukanlah sebuah perubahan yang berkaitan dengan aturan SNI wajib pada mainan anak. Awalnya penerapan SNI ini dilakukan untuk melindungi para konsumen mainan anak di Indonesia dari bahaya mainan anak yang di impor dari China.

Pada dasarnya penerapan SNI ISO ini merupakan suatu

bentuk kebijakan yang telah mengikat banyak pihak terkait didalamnya, kebijakan ini akan berjalan dengan efektif apabila kebijakan tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah aturan yang jelas dan pasti tidak berpihak hanya pada kepentingan tertentu saja. Dari pihak Indonesia sendiri menginginkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat melindungi seluruh konsumen yang membeli produk mainan dari China, sementara dari pihak China sendiri dengan menerapkan peraturan tersebut dapat mampu membuktikan bahwa memang kualitas produk mainan dari China memang bagus adanya tidak dapat membahayakan anak-anak usia 14 tahun kebawan dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku di kancan internasional. Sehingga tidak perlu diragukan lagi produk mainan dari China.

- **Regulasi mengenai Standarisasi Bidang Perdagangan terhadap Impor Mainan Anak dari China.**

Regulasi mengenai standarisasi yang ada di Indonesia memang digunakan untuk lebih

melindungi serta memperkuat produk di dalam negeri, salah satunya yaitu produk mainan di Indonesia. Regulasi standarisasi bidang perdagangan ini berkaitan dengan sebuah upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap barang yang di impor oleh China, dalam kasus disini ada semua produk mainan anak dari China.

Importir China yang melakukan kegiatan impor mainan anak dan produk mainan tersebut diberlakukan aturan SNI wajib harus wajib memiliki NPB sebelum produk tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak akan pikir panjang untuk memberikan sanksi berupa pencabutann izin produk impor kepada para importir China apabila tidak memperhatikan dan melaksanakan regulasi tersebut. Dari hal tersebut khususnya Kementerian Perdagangan mengharapkan para konsumen dalam negeri juga memberikan sebuah kontribusi dengan turut memantau dan memberikan informasi apabila terdapat adanya peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan aturan.

Sementara dari sisi China sendiri kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia dianggap sebagai bentuk dari kerjasama untuk lebih memperkuat hubungan perdagangan diantara keduanya. Tentunya China juga melihat dari ruang lingkup perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya yaitu, ACFTA dengan perdagangan bebas yang terjadi wajar saja apabila Indonesia mengambil sikap tegas yang digunakan untuk memproteksi negara nya dari serangan negara lain. Liberalisasi perdagangan yang saat ini Indonesia sedang hadapi mengharuskan Indonesia melakukan sebuah tindakan yang proporsional demi menyelaraskan kebutuhan Indonesia untuk lebih meningkatkan sistem perekonomian di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Impor Mainan Anak dari China.

Berkaitan mengenai sebuah implementasi kebijakan yang sudah dibuat dari regulasi yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya pasti akan ada hasil akhir mengenai pemberlakuan kebijakan tersebut apakah berhasil

atau tidak terhadap permasalahan mengenai impor produk mainan anak yang sedang melonjak tinggi. Hasil dari kebijakan tersebut yaitu terjadi nya sebuah penurunan yang cukup signifikan terhadap impor mainan anak di Indonesia, di tahun 2014 impor mainan anak di Indonesia mencapai USD 106,7 juta sedangkan di tahun 2015 menyentuh angka USD 53.6 juta. Jika dilihat terjadi sebuah penurunan sekitar 50% terhadap impor mainan anak di Indonesia salah satunya dari China. Kalau dilihat dari adanya sebuah penurunan angka berarti dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dan pastinya juga pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan tersebut sangat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam hal ini, strategi yang diambil oleh pemerintah saat itu sangatlah tepat sekali untuk memproteksi barang dari luar negeri walaupun dalam kebijakan tersebut impor produk mainan anak masih bebas melalui pelabuhan yang tertulis di dalam peraturan tersebut.

Tentunya dalam hasil akhir yang seperti itu masyarakat sangat menyambut baik dan bisa merasakan perubahan terhadap produktivitas mainan anak dalam negeri yang dapat berjalan dengan baik. Para masyarakat di Indonesia menilai bahwa program atau sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana di awal.

Namun, tidak cukup sampai disitu saja di tahun-tahun berikutnya nilai impor mainan anak terus mengalami kenaikan, di tahun 2016 naik menjadi USD 73,1 juta dan naik lagi di tahun 2017 menjadi USD 110,7 juta, di tahun 2018 nilai impor naik lagi menjadi USD 183,6 juta. Sekitar 20-30% presentasi kenaikan yang terjadi setiap tahunnya. Melihat peristiwa tersebut tentunya pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu peraturan saja, oleh karena itu dibuatlah peraturan lainnya yang tentunya digunakan untuk menekan kenaikan nilai impor di tahun 2016-2018.

Setelah diterapkannya tiga regulasi tersebut ternyata kita masih melihat tingginya nilai impor mainan anak di Indonesia, hal tersebut dapat dikatakan masih adanya

faktor kegagalan yang terjadi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Faktor kegagalan tersebut dapat dilihat dari isu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, karena masih adanya ketidaktegasan pemerintah pusat ataupun organisasi yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bisa juga kurangnya sebuah pengawasan yang ketat dalam penerapan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kurangnya sebuah informasi yang valid juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Dengan hal ini bisa saja Indonesia belum mampu untuk mencari informasi banyak mengenai kondisi lapangan dalam kegiatan impor yang terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia ataupun instansi yang terkait kurang teliti dalam merumuskan suatu kebijakan impor.

Setelah itu kurangnya dukungan dari seluruh elemen pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan tersebut, mungkin saja ada pihak-pihak yang

curang ataupun memang dengan sengaja tidak mau menjalankan kebijakan tersebut dengan baik karena dirasa terlalu rumit dan berbelit.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan tentunya akan ada hambatan yang terjadi di dalam proses pemberlakuan kebijakan tersebut, karena pada dasarnya hambatan tersebut muncul ketika pemerintah kurang mampu untuk menyentuh sasaran yang tepat seperti para importir dan juga oknum-oknum yang terlibat dalam proses impor barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri.

Hambatan yang muncul didalam penerapan kebijakan tersebut yaitu :

1. Faktor ketergantungan terhadap impor bahan baku dari China.
2. Pihak importir China yang mendaki pengujian SNI mainan dapat dilakukan selain di Indonesia.
3. Kurang adanya tindakan pemerintah untuk terjun

langsung ke lapangan guna untuk monitoring seluruh kegiatan impor produk mainan anak.

4. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri.
5. Kurang adanya kerjasama yang sinkron antara para pembuat kebijakan dengan lembaga masyarakat dan juga dengan instansi terkait untuk menyatukan sebuah kebijakan agar dapat berjalan dengan semestinya dan dapat membendung produk impor yang masuk ke Indonesia (Kemenperin, 2019).

KESIMPULAN

Kebijakan Luar Negeri merupakan salah satu upaya terakhir yang dilakukan oleh setiap negara untuk melindungi setiap komponen ataupun elemen yang dimiliki oleh negara tersebut agar tetap dalam kondisi yang stabil dan baik sehingga tidak merugikan negara tersebut dan mengakibatkan sistem

perekonomian di negara tersebut menjadi menurun.

Seperti Indonesia sejak diberlakukannya ACFTA memang telah mengalami sebuah arus liberalisasi perdagangan yang cukup sengit dengan negara anggota di dalamnya salah satunya dengan China.

Perdagangan bebas antara Indonesia dengan China telah menyebabkan nilai impor di Indonesia menjadi tinggi salah satu produk yang terkena imbasnya ialah produk mainan anak dari China. Melalui permasalahan diatas maka dibuatlah sebuah kebijakan yang dianggap mampu untuk menekan nilai impor di Indonesia yang sangat tinggi.

Namun, pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan karena beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk Indonesia hindarkan. Pada dasarnya sampai kapanpun nilai impor produk mainan

anak di Indonesia akan terus mengalami peningkatan karena memang sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan barang impor China untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Indonesia tidak dapat menghindari laju pertumbuhan impor yang datang dari China.

REFERENSI

- BSN, H. (2018, January 23). *SIARAN PERS: Lindungi Anak dari bahaya, BSN tetapkan SNI Mainan Anak*. Retrieved from bsn.go.id: <https://bsn.go.id/main/berita/detail/8981/siaran-pers-lindungi-anak-dari-bahaya-bsn-tetapkan-sni-mainan-anak>
- Bungin. (2012).
- Burning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.
- Dugis, V. (2007). *Analysing Foreign Policy, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*.
- Dwinanda, S. A. (2017, Juni 18). *Barang Impor Cina Membanjir, Pemerintah Diminta Tegas*. Jakarta: Republika.co.id.
- Indrawan. (2004). *Standarisasi Mutu Produk Bagi Perlindungan Konsumen*. In *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia* (pp. hal. 44-47). Jakarta: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132951-T%2027796-Tinjauan%20yuridis-Tinjauan%20literatur.pdf>.
- Kemendag. (2010, Februari). *ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA*. Retrieved from [Kemendag.co.id](https://www.kemendag.go.id): <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>
- Kemendag. (2015). *Peraturan Ketentuan Produk Impor Tertentu*. Retrieved from [kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id): <http://www.kemendag.go.id>
- Kemenperin. (2019, Oktober 17). *Tantangan dan Upaya Penyelesaian Industri Mainan Anak-Anak*. Retrieved from ikm.kemenperin.go.id: ikm.kemenperin.go.id
- Sadewo, D. S. (2015, Desember 22). *Ini Cara Importir Masukkan Mainan Anak Ilegal ke Indonesia*. Retrieved from [Republika: Republika.co.id](http://Republika.co.id)
- Setiawan, S. (2012). *ASEAN-China FTA : The Impacts on The Exports of Indonesia and China*. Vol 6. No.2.
- Trademap. (2014). Retrieved from <https://www.trademap.org/Index.aspx>
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wicaksana, I. W. (2007). *Epistemologi Politik Luar Negeri: 'A Guide to Theory', Global dan Strategi*.
- Winarno. (2011).

